

**Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Internal Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik
(Studi Empiris Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja)**

Karmilasari¹, Muhammad Nasir², Neneng Hafsa³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pejuang Republik Indonesia, Makassar
029karmilasari@gmail.com¹, nasir.achi69@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan keuangan Organisasi Sektor Publik (Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain: Angket yang diberikan kepada 35 orang sebagai responden. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan SPSS 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Kata kunci : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan

Abstract

This study aims to determine the Influence of Human Resource Competence and Internal Control on the Quality of Financial Reports of Public Sector Organizations (Regional Government of Tana Toraja Regency). The techniques used in data collection include: Questionnaires given to 35 people as respondents. The data analysis method used is Multiple Linear Regression Analysis using SPSS 21. The results of this study indicate that there is an influence of human resource competence and Internal Government Control on the quality of the financial statements of the local government of Tana Toraja Regency.

Keywords: Human Resources Competence, Internal Government Control and Quality of Financial Reports

Pendahuluan

Saat ini di Indonesia telah banyak berdiri organisasi sektor publik selain pemerintah daerah. Organisasi sektor publik tersebut dituntut untuk semakin mengedepankan akuntabilitas. Salah satu indikator yang menunjukkan akuntabilitas organisasi sektor publik yaitu melalui laporan keuangan. Laporan keuangan ini terbagi menjadi empat jenis, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Masing-masing dari keempat jenis laporan memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Misalnya laporan laba rugi yang memiliki fungsi untuk membandingkan antara pendapatan dan beban (*matching concept*). (Yudiati. 2007)

Pemerintah Daerah, sebagai salah satu pure-nonprofit organization juga tidak lepas dari tuntutan untuk mengedepankan akuntabilitas. Beberapa peraturan yang memuat mengenai standar pelaporan keuangan pemerintah daerah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang kemudian diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi mengeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah Selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP basis akrual. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar dalam penyajiannya laporan keuangan lebih accountable dan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat, DPRD dan masyarakat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat didalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemakai. Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan entitas tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal tersebut didasarkan fakta masih sedikitnya pemerintah yang laporan keuanagnnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dari penelitian-penelitian terdahulu yang sering dilakukan, kualitas laporan keuangan biasanya disebabkan oleh beberapa hal seperti kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi, peran audit internal pemahaman terhadap penerapan sistem akuntansi pemerintahan dan faktor-faktor yang lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukmanigrum dan Indriasari menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian internal termasuk dalam beberapa hal yang menjadi faktor penentu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sebagai suatu kabupaten yang dibentuk pada tanggal 31 Agustus 1957, kualitas laporan keuangan yang dimiliki oleh kabupaten Tana Toraja dikatakan cukup baik karena segala bantuan dan pegawalan BPKP dalam pendampingan pengelolaan keuangan daerah, sehingga dua tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dapat memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan menargetkan WTP untuk tahun selanjutnya. Akan tetapi, pada tahun 2020 dalam masa pandemik covid-19, ditemukan data penyalagunaan dana Covid-19 di Kabupaten Tana Toraja yang dilaporkan oleh Forum Mahasiswa Toraja yang bersumber dari investigasi langsung dilapangan dan beberapa laporan masyarakat serta pemberitaan dimedia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk penanggulangan pandemik Virus Corona tidak sebanding lurus dengan implementasi dilapangan.

Protes dari berbagai kalangan termasuk dari anggota DPRD Tana Toraja agar berhati-hati dalam penganggaran dan pengelolaan anggaran Covid-19 dengan nilai yang cukup fantastik sekitar Rp 75 milyar sehingga sangat rawan untuk kepentingan tertentu. Bahkan mulai dari proses pengadaan barang dan jasa yang dinilai tidak transparan dan akuntabel, misalnya rincian pengelolaan anggaran tidak bisa diuraikan secara rinci dan dipertanggungjawabkan oleh Satgas Covid-19. Serta penyaluran bantuan yang tidak merata dan ada dugaan *mark-up* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu dari beberapa kali diadakan inspeksi, kalangan dewan menilai bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kurang tegas untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi dan meminta pemerintah kabupaten agar segera berbenah. Beberapa temuan menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian internal atas pengelolaan keuangan selama pandemik belum cukup memuaskan. Kompetensi sumber daya manusia dan system pengendalian internal pemerintah merupakan factor yang sangat signifikan atau berpengaruh untuk menunjang kualitas laporan keuangan daerah khususnya pada kabupaten Tana Toraja.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin No. 3 Makale, Kabupaten

Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja sebanyak 35 orang. Karena jumlah populasi kurang dari 100 maka seluruh populasi dijadikan sampel penelitian (*Sugiyono 2007*) yaitu jumlah sampel sebanyak 35 Staf Pegawai. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan regresi linear berganda.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Regresi digunakan untuk menguji besarnya pengaruh antara variable bebas sumber daya manusia dan system pengendalian internal pemerintah (X) terhadap variable terikat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y)

Persamaan Regresi Linear Berganda

analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dari hasil output SPSS 21 diatas, maka persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 3,329 + 0,494X_1 + 0,459X_2$$

1) Nilai konstantanya yaitu 3.329 maka dapat diartikan jika kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah nilainya adalah 3,329, maka kualitas laporan keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 3,329.

2) Nilai koefisien regresi pada variable kompetensi sumber daya manusia (X1) bernilai positif, yaitu sebesar 0,494 yang artinya bahwa setiap peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,494 satuan dengan asumsi variable independen nilainya tetap.

3) Nilai koefisien regresi pada variable sistem pengendalian internal pemerintah (X2) bernilai positif, yaitu sebesar 0,459 yang artinya bahwa setiap peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,495 satuan dengan asumsi variable independen nilainya tetap.

b. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah, terhadap kualitas laporan keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja digunakan koefisien determinasi (R Square). Hasil koefisien determinasi berganda dapat ditunjukkan pada tabel 4.19:

Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.725 ^a	.526	.496	2.381	1.842

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.19. dapat diketahui besarnya koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,526. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa 52,6% besarnya kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kedua variabel bebas yang terdiri dari kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah. Sedangkan sisanya sebesar 47,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

b. Uji Statistik F

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh variable independen atau bebas secara bersama-sama dapat mempengaruhi variable dependen atau terikat. Berikut hasil uji F dengan menggunakan SPSS 21.

Hasil Signifikansi Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	201.335	2	100.667	17.757	.000 ^b
Residual	181.408	32	5.669		
Total	382.743	34			

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} yaitu 17,757 sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 2,901 dan signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh secara simultan antara kompetensi sumber daya manusia (X_1) dan sistem pengendalian internal pemerintah (X_2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y).

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t)

Uji t digunakan untuk menguji dan melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dan variable Y. Apabila t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} maka hipotesis diterima dan sebaliknya. Hasil t-hitung variable X dan Variabel Y dapat dilihat dari tabel berikut:

Uji Signifikansi (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std Error	Beta		
Constant	3.329	6.119		.544	.590
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.494	.157	.463	3.142	.004
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	.459	.191	.355	2.404	.022

Nilai t_{hitung} dapat diperoleh dari rumus $df=n-k-1$ atau $35-2-1= 32$ maka dapat nilai t_{tabel} nya yaitu sebesar 2,037 kriteria pengujiannya yaitu apabila nilai signifikansi $<0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$. H_a diterima (terdapat pengaruh) dan sebaliknya apabila nilai signifikansi $>0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima (tidak terdapat pengaruh) maka hipotesisnya sebagai berikut:

1) Hipotesis variable kompetensi sumber daya manusia (X_1)

Dari Tabel diatas dapat diketahui nilai t_{hitung} untuk variable kompetensi sumber daya manusia (X_1) yaitu sebesar 3,142 sedangkan t_{tabel} diperoleh 2,037 dan signifikansi 0,004 maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan sigfikansi $< 0,05$ yakni H_a diterima, artinya kompetensi sumber daya manusia (X_1) secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2) Hipotesis variabel sistem pengendalian internal pemerintah (X_2)

Dari tabel diatas dapat diketahui nilai t_{hitung} untuk variable sistem pengendalian internal pemerintah (X_2) yaitu sebesar 2,404 sedangkan t_{tabel} diperoleh 2,037 dan signifikansi 0,022, maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan signifikansi $< 0,05$ yakni H_a diterima, artinya sistem pengendalian internal pemeintah (X_2) secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pemerintah kabupaten Tana Toraja. Menilai kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk dalam hal penyusunan atau penyajian laporan keuangan dari beberapa pengetahuan dan kemampuan khusus yang dimiliki setiap pegawai serta sikap dan tanggung jawab setiap pegawai terhadap tugasnya masing-masing. Pengetahuan dan kemampuan dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan jurusan pegawai dibagian akuntansi dan pengelolaan keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Tana Toraja. Sedangkan sikap setiap pegawai dapat dilihat dari deskripsi jabatannya. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh t_{hitung} 3,142 dan t_{tabel} 2,037 dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,142 > 2,037$), maka hipotesis pertama diterima. Berdasarkan hasil peneltitian, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia di kabupaten Tana Toraja

tersebut berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari staf yang memiliki pendidikan, pengalaman serta kerjasama yang baik dalam setiap bidang. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Ayu Aprilia (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada pemerintah kabupaten Tana Toraja sudah efektif dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penyusunan laporan keuangan sudah dilakukan dengan teliti dalam memerhatikan kebocoran ataupun penyimpangan atas laporan keuangan. Adanya pemantauan yang dilakukan oleh pimpinan dengan selalu meriview atau memeriksa dan mengevaluasi informasi dan melakukan perbaikan sehingga pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan selanjutnya atau mengurangi resiko pelanggaran yang ada.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Tana Toraja, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh F_{hitung} 17,757 dan F_{tabel} 2,901 dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($17,757 > 2,901$) maka hipotesis ketiga diterima. Kompetensi sumber daya manusia yang diiringi dengan sistem pengendalian internal pemerintah seorang staf untuk memperoleh prestasi dalam kinerjanya. Simultan disini berarti bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah tidak boleh di pisahkan. Karena jika sumber daya manusia memiliki kompetensi yang tinggi tanpa dibarengi dengan sistem pengendalian yang efektif bisa jadi kompetensi tersebut bukan untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam hal ini kualitas laporan keuangan akan tetapi hanya untuk meraih kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dilihat dari nilai koefisien korelasi yang cukup tinggi. Selain itu nilai koefisien determinasi sebesar 52,6%. Artinya kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern memiliki pengaruh sebesar 52,6% terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Pengendalian intern pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dilihat dari nilai koefisien korelasi yang cukup tinggi. Selain itu nilai koefisien determinasi sebesar 52,6%. Artinya kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern memiliki pengaruh sebesar 52,6% terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Kondisi sumber daya manusia pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pemerintah kabupaten Tana Toraja sudah memenuhi peraturan penulisan keuangan yang sesuai dengan kriteria sistem akuntansi keuangan daerah dan dalam penyusunan laporan keuangan sudah dilakukan dengan teliti dalam memerhatikan kebocoran ataupun penyimpangan atas laporan keuangan. Adanya pemantauan yang dilakukan oleh pimpinan dengan selalu meriview atau memeriksa dan megevaluasi informasi dan melakukan perbaikan sehingga pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan selanjutnya atau mengurangi resiko pelanggaran yang ada.

Bibliografi

- Abdussamad, Yuriko, 2013. *Pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Kompetensi*. Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo
- Agung, Anak A.P. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan *System Pengendalian Internal Pemerintah*. [http://www.bpkb.go.id/spip/konten/400/sekilas SPIP](http://www.bpkb.go.id/spip/konten/400/sekilas_SPIP).
- Bastian, Indra, 2006 *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat Jakarta.
- Faud, Ramli M. 2015. *Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah*. Ghalia Indonesia Bogor.
- Halim, Abdul Dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat Jakarta.
- Harahap, Sofyan. 1995. *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*. Bumi Aksara Jakarta.
- Herry. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. CAPS, Yogyakarta.
- Hartono, Jogiyanto.2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Edisi Kelima BPFEE, Yogyakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Indrisari, Desi Dan Ertambang Nahartiyo, 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Gadjadara, Yogyakarta.